



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Maret 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
UNIT KERJA : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
SUB UNIT KERJA : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MAJERUM PURNI
2. Jabatan : KEPALA SATUAN
3. NHK : 141104

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 565.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 250 m2/130 m2 di KOTAWARINGIN BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 170 m2/48 m2 di KOTAWARINGIN BARAT, WARISAN Rp. 90.000.000
3. Tanah Seluas 7200 m2 di KOTAWARINGIN BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 8640 m2/240 m2 di KOTAWARINGIN BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 242.500.000

1. MOTOR, YAMAHA XEON SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
2. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000
3. MOBIL, HONDA JAZZ RS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 226.000.000
4. LAINNYA, SEPEDA BALAP FIXIE BALAP Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 85.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 52.538.201**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---



Sub Total	Rp.	945.038.201
III. HUTANG	Rp.	120.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	825.038.201

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **14 April 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.